**BAB VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

1. **Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan**
	1. **Entintas Akuntansi**

Sesuai Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Nama Entitas di Jajaran Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

|  |
| --- |
| 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Puskesmas Magelang Selatan
4. Puskesmas Jurangombo
5. Puskesmas Magelang Tengah (Botton)
6. Puskesmas Kerkopan
7. Puskesmas Magelang Utara
8. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
11. Satuan Polisi Pamong Praja
12. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
13. Dinas Sosial
14. Dinas Tenaga Kerja
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23. Dinas Pertanian dan Pangan
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25. Sekretariat Daerah
	1. Bagian Tata Pemerintahan
	2. Bagian Organisasi
	3. Bagian Hukum
	4. Bagian Perekonomian
	5. Bagian Pembangunan
	6. Bagian Kesejahteraan Rakyat
	7. Bagian Hubungan Masyarakat
	8. Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
	9. Bagian Umum
26. Sekretariat DPRD
27. Kecamatan Magelang Selatan
28. Kecamatan Magelang Tengah
29. Kecamatan Magelang Utara
30. Inspektorat
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
33. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
34. Badan Penelitian dan Pengembangan
 |

* 1. **Entintas Pelaporan**
1. **Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota**

 **Magelang**

Pembangunan Kota Magelang tak lepas dari campur tangan pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola sumber – sumber potensi yang ada di Magelang. Salah satu badan yang membantu pemerintah dalam mengupayakan peningkatan pembangunan tersebut yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi serta otonomi fiskal maka daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak atau retribusi dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, menjadi tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang selaku perangkat daerah untuk membantu pemerintah Kota Magelang dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Visi BPKAD Kota Magelang yaitu :

“Terwujudnya pengelolaan keuangan yang profesional, akuntabel dan transparan”.

Sedangkan Misi BPKAD Kota Magelang yaitu :

1. Mewujudkan aparatur Pengelola Keuangan daerah yang profesional, akuntabel dan transparan.
2. Mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
3. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.

**2**) **Struktur dan Fungsi Tugas Pokok BPKAD**

Berdasarkan Tugas Pokok dan wewenang masing-masing jabatan di BPKAD Kota Magelang dapat dijelaskan menggunakan bagan. Struktur organisasi BPKAD Kota Magelang diperlukan sebagai sarana untuk menunjang peningkatan kemampuan dan fungsi organisasi, serta memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban sekaligus mencerminkan pembagian tugas dan wewenang dalam suatu organisasi kedinasan selanjutnya, aliran kekuasaan dan tanggung jawab bercabang dalam setiap tingkat unit kerja. Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hierarki.

Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara sfisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Organisasi yang dimaksud untuk membina keharmonisan kerja, agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur dan penuh tanggung jawab. Sehingga rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.

**Gambar 6.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Magelang**

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDAPATAN

BIDANG ANGGARAN

BIDANG PEMBELANJAAN

BIDANG AKUNTANSI

BIDANG ASET

SUB BIDANG PERENCANAAN & PENGHAPUSAN ASET

SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET

SUB BIDANG PENDAYAGUNAAN ASET

SUB BIDANG PERBENDAHARAAN & PEMBIAYAAN

SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG

SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG

SUB BIDANG PENGEMBANGAN AKUNTANSI

SUB BIDANG ANALISA LAPORAN

SUB BIDANG PELAPORAN

SUB BIDANG PENDAFTARAN & PENDATAAN DAERAH

SUB BIDANG PENAGIHAN & KEBERATAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN

SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN

SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

SUB BIDANG PENETAPAN & PENATAUSAHAAN PENDAPATAN

**3) Tugas dan Fungsi Jabatan**

Kekuasaan tertinggi terletak pada Kepala Badan Pengelolan Keuangan Dan Aset Daerah. Kepala badan mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah membawahi 6 (enam) kepala sub dinas yaitu:

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelolan Keuangan Dan Aset Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan dinas. Sekertaris membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretariat dalam menyusun rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaanya.

1. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekertaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administratif kepegawaian di lingkungan dinas.

1. Kepala Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam bidang pendapatan asli daerah. Kepala pendapatan asli daerah membawahi 3 (tiga) sub bagian:

1. Sub Bagian Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah.

Sub Bagian Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam sub bidang pendaftaran, pendataan.

1. Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan.

Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam penetapan dan pemungutan pajak daerah, pengkoordinasian dan pengendalian retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Sub Bidang Penagihan Dan Keberatan.

Sub Bidang Penagihan Dan Keberatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam sub bidang keberatan, angsuran dan pendapatan.

1. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam bidang anggaran dan mempunyai fungsi yaitu perencanan penyusunan program, pengkoordinasian pelaksanaan program, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian program serta kegiatan bidang anggaran. Kepala bidang anggaran membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran.

Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam sub bidang perencanaan anggaran,

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

Sub Bidang Penyusunan Anggaran tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam sub bidang penyusunan anggaran.

1. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam sub bidang pengendalian anggaran.

1. Kepala Bidang Pembelanjaan

Kepala bidang pembelanjaan mempunyai tugas pokok membantu kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam bidang pembelanjaan. Kepala bidang pembelanjaan membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembelanjaan dalam sub bidang belanja tidak langsung.

1. Sub bidang Belanja Langsung

 Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembelanjaan dalam sub bidang belanja langsung.

1. Sub bidang Perbendaharaan Dan Pembiayaan

 Sub Bidang Perbendaharaan Dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembelanjaan dalam sub bidang perbendaharaan dan pembiayaan.

1. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala bidang akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam bidang akuntansi. Kepala bidang akuntansi membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

1. Sub Bidang Pengembangan Akutansi

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntasi dalam sub bidang pengembangan akuntansi.

1. Sub Bidang Analisa Laporan

Sub Bidang Analisa Laporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam sub bidang analisa laporan.

1. Sub bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam sub bidang pelaporan.

1. Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam bidang aset. Kepala Bidang Aset membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan Dan Penghapusan Aset

Sub Bidang Perencanaan Dan Penghapusan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset dalam sub bidang perencanaan dan penghapusan aset.

1. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset dalam sub bidang penatausahaan aset.

1. Sub Bidang Pendayagunaan Aset

Sub Bidang Pendayagunaan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset dalam sub bidang pendayagunaan aset.

1. **Kondisi Geografis Dan Jumlah Penduduk Kota Magelang**
	1. **Letak Geografis**

  Perkembangan dan dinamika Kota Magelang yang pesat sebagai Kota Jasa saat ini tidak terlepas dari kondisi geografis yang ada walaupun luasnya hanya 18,12 km2. Secara geografis Kota Magelang terletak pada 110o12’30” - 110o12’52” Bujur Timur dan 7o26’28” - 7o30’9” Lintang Selatan serta terletak pada posisi strategis, karena berada tepat di tengah-tengah Pulau Jawa, dan berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo, di samping berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng dan Dataran Tinggi Dieng.

 Letak strategis Kota Magelang juga ditunjang dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Secara topografis Kota Magelang merupakan dataran tinggi yang berada kurang dari lebih 380 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan berkisar antara 5o - 45o, sehingga Kota Magelang merupakan wilayah yang bebas banjir dengan ditunjang keberadaan Sungai Progo di sisi barat dan Sungai Elo di sisi timur. Klimatologi Kota Magelang dikategorikan sebagai daerah beriklim basah dengan curah hujan yang cukup tinggi sebesar +7,10 mm/th.

 Secara administratif Kota Magelang terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

* Sebelah Utara, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
* Sebelah Timur, Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
* Sebelah Selatan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
* Sebelah Barat, Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
1. Kecamatan Magelang Utara
Luas wilayah 6.128 m2, Terdiri dari 5 kelurahan yaitu:
a) Kelurahan Potrobangsan
b) Kelurahan Wates
c) Kelurahan Kedungsari
d) Kelurahan Kramat Selatan
e) Kelurahan Kramat Utara
2. Kecamatan Magelang Tengah
Luas wilayah 5.104 m2, Terdiri dari 6 kelurahan yaitu:
a) Kelurahan Kemirirejo
b) Kelurahan Cacaban
c) Kelurahan Magelang
d) Kelurahan Panjang
e) Kelurahan Gelangan
f) Kelurahan Rejowinangun Utara
3. Kecamatan Magelang Selatan
Luas wilayah 6.888 m2, Terdiri dari 6 kelurahan yaitu:
a) Kelurahan Jurangombo Selatan
b) Kelurahan Jurangombo Utara
c) Kelurahan Magersari
d) Kelurahan Rejowinangun Selatan
e) Kelurahan Tidar Utara
f) Kelurahan Tidar Selatan
	1. **Jumlah Penduduk**

 Perkembangan penduduk Kota Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tabel 6.1 terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2016 yaitu 132.662 jiwa. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Kota Magelang Tahun 2016**

| **Kelompok Umur** | **Jumlah Penduduk** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- |
| **L** | **P** |
| Total | 65.375 | 67.287 | 132.662 |
| 0 – 4 | 4.071 | 3.822 | 7.893 |
| 5 – 9 | 4.833 | 4.562 | 9.395 |
| 10 – 14 | 5.139 | 4.923 | 10.062 |
| 15 – 19 | 5.268 | 5.037 | 10.305 |
| 20 – 24 | 5.330 | 5.003 | 10.333 |
| 25 – 29 | 4.812 | 4.576 | 9.388 |
| 30 – 34 | 5.056 | 4.810 | 9.866 |
| 35 – 39 | 5.270 | 5.251 | 10.521 |
| 40 – 44 | 4.954 | 5.098 | 10.052 |
| 45 – 49 | 4.935 | 5.316 | 10.251 |
| 50 – 54 | 4.261 | 5.116 | 9.377 |
| 55 – 59 | 3.850 | 4.283 | 8.133 |
| 60 – 64 | 3.156 | 3.146 | 6.302 |
| 65 – 69 | 1.679 | 2.079 | 3.758 |
| 70 – 74 | 1.179 | 1.732 | 2.911 |
| 75+ | 1.582 | 2.533 | 4.115 |

Sumber : DISPENDUKCAPIL Kota Magelang

 Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Magelang sebesar 132.662 jiwa yang terdiri dari 65.375 jiwa penduduk laki-laki dan 67.287 jiwa penduduk perempuan. Komposisi jumlah penduduk Kota Magelang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.

 Hal ini mengindikasikan perlunya kegiatan pemberdayaan perempuan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya perempuan serta meningkatkan kapasitas diri perempuan sebagai upaya untuk menuju pembangunan berkelanjutan.